

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI GERABAH

Dian Ayuningtyas, Hesti Lestari, Dewi Rostyaningsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The pottery education tourism village is an innovation by the village youth that aims to preserve the pottery potential of Rendeng Village. This tourist village was developed by the Rendeng Village Government because the potential for pottery produced by residents is very large to help the community's economy. This study aims to analyze the role of village governments in the development of tourism villages and analyze the supporting and inhibiting factors of the role of village governments. The type of research is descriptive qualitative, with techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study show the role of the Rendeng Village Government as a social animation, namely providing extensive opportunities for BUMDes and Karang Taruna and initiating tourism development programs; mediation and negotiation, namely holding village rembug and socialization; providing support, namely conducting coaching and moral support to citizens; group facilitation, namely building infrastructure; utilization of resources and skills, namely carrying out coaching and training to the community; and the role of organizing, namely monitoring and evaluating village community organizations. This role has not been fully optimized because there are obstacles related to the low level of education of some residents, limited funds, and the absence of village regulations. Researchers provide advice to village governments to conduct coaching and training; seek financial assistance and establish cooperation with outside investors; and immediately create a legal basis related to tourism villages.

Keywords: Role, Village Government, Tourism Village

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam konsep otonomi daerah. Kualitas mutu hidup masyarakat desa juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan wilayah yang mempunyai taraf hidup yang berkualitas dan mandiri. Pemerintah desa merupakan elemen pemerintah yang dapat menunjang pembangunan nasional dan kemajuan negara Indonesia. Kemampuan pemerintah desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat serta kelembagaannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah kini memiliki peluang yang luas untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi daerahnya, termasuk mengelola sektor pariwisata. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Sektor wisata yang berkembang maju akan mampu mendorong sektor lainnya untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor perkebunan, pertanian, peternakan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan memanfaatkan dan mengembangkan industri pariwisata secara maksimal. Terkait hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik untuk menumbuhkan barang-barang yang berhubungan dengan pariwisata di wilayah Indonesia. Pemerintah kini banyak berinvestasi dalam pengembangan desa wisata dengan tujuan meningkatkan keuntungan devisa, ekonomi, pendapatan daerah, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat, peluang pertumbuhan bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tempat wisata apabila ditangani secara efektif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan kawasan di sekitar tempat wisata tersebut.

Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 419 desa dan 28 kecamatan secara administratif. Desa Rendeng, salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro, memiliki luas 52,8 Ha dan terletak di Kecamatan Malo. Berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh, diketahui bahwa potensi sumber daya alam di Desa Rendeng sangat besar. Hal ini didukung oleh lokasi kawasan yang berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo, sehingga memungkinkan penduduk setempat memanfaatkan kualitas tanah di sepanjang tepian sungai dan di dasarnya untuk memproduksi gerabah. Gerabah merupakan salah satu kerajinan lokal

paling lama di Indonesia. Kearifan lokal ini perlu dikembangkan untuk mencegah kepunahan dan memudarnya minat masyarakat dalam melestarikan gerabah.

Gerabah di desa tersebut dilestarikan oleh warga setempat dan memiliki keunikan dengan berbagai macam bentuk, warna, serta motif yang beragam. Gerabah di Desa Rendeng juga memiliki potensi tinggi karena kualitas gerabahnya sangat kuat. Pada mulanya masyarakat Desa Rendeng membuat gerabah hanya untuk keperluan peralatan dapur, seperti cobek, kendi, tungku, dan wajan. Seiring dengan perkembangannya, masyarakat setempat mulai berinovasi dalam menciptakan kerajinan gerabah yang lebih beraneka ragam, seperti celengan, patung, guci, pot tanaman, dan berbagai bentuk lainnya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai membangun dan mengembangkan Desa Wisata Edukasi Gerabah pada tahun 2015. Hal itu karena potensi gerabah yang diproduksi oleh warga Desa Rendeng sangat besar untuk membantu perekonomian masyarakat setempat. Wisata edukasi yang dibuat dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu contoh inovasi karya pemuda desa, yang

bertujuan untuk melestarikan potensi kerajinan gerabah asli Desa Rendeng.

Tabel 1. 1

**Jumlah Wisatawan Nusantara Desa
Wisata Edukasi Gerabah
Tahun 2018 – 2022**

| No. | Tahun | Wisatawan Nusantara |
|---------------|-------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 2018 | 17.430 |
| 2 | 2019 | 29.313 |
| 3 | 2020 | 4.958 |
| 4 | 2021 | 6.912 |
| 5 | 2022 | 6.380 |
| Jumlah | | 64.430 |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, 2022

Seperti yang telah diketahui, wabah COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian nasional dan global sejak akhir Maret 2020. Pandemi tersebut juga berdampak pada industri pariwisata Indonesia, khususnya Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng.

Selain pandemi yang memang berdampak pada semua sektor ekonomi, pada pengembangan desa wisata edukasi gerabah ini juga dibutuhkan Inovasi dalam pelayanan pariwisata sendiri. Inovasi sangat diperlukan dalam produk wisata. Pemerintah desa perlu melakukan pembaharuan kegiatan-kegiatan di desa.

Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati dan tidak bosan menyaksikan kegiatan tersebut.

Pemerintah desa di sini perlu berperan dalam memunculkan ide baru yang kreatif agar objek wisata edukasi gerabah ini semakin diminati wisatawan. Pada pengembangan desa wisata ini, gagasan terbaru mesti digali dan dimunculkan sebagai komoditas wisata. Sebuah objek wisata harus terus berinovasi agar wisatawan ketagihan berkunjung. Jika tanpa inovasi tentunya tidak akan berkembang, karena pada dasarnya wisatawan akan terus menginginkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru inilah yang akan menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan, termasuk wisatawan repeater agar tidak bosan berkunjung di desa wisata edukasi gerabah.

Pemerintah desa juga perlu memberi dorongan berupa bantuan atau pembinaan bagi rintisan desa wisata potensial, meski pada awalnya pembangunan desa wisata ini diinisiasi oleh pemuda desa. Hal itu agar dampak pengembangan desa wisata ini relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Di sini harus ada kemauan dari pemerintah desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa.

Sejauh ini belum pernah ada pengkajian secara cermat terkait peran

Pemerintah Desa Rendeng dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Pada penelitian ini telah dilakukan analisa terhadap Peran Pemerintah Desa Rendeng dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?.
- b. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?.

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Administrasi Publik didefinisikan oleh Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Yeremias T. Keban, 2014:5), yang merupakan proses kolaboratif dalam ruang publik yang melibatkan cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik dan membuatnya menjadi sebuah proses politik. Administrasi Publik

menurut Gerald E. Caiden (dalam Lely I. Mindarti, 2016:4), merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (*administration for the public affairs*).”

Kerja sama orang-orang dalam mencapai tujuan itu perlu disusun dan diatur, dan untuk itu administrasi memerlukan organisasi. Organisasi publik sering terlihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintah. Pada ilmu administrasi publik, manusia dalam organisasi bertindak mewakili peranan individual yang dimainkan (sebagai kepala, sekretaris, atau bendahara) bukan sebagai pribadi yang utuh. Hal yang ditonjolkan di sini adalah bagaimana suatu peran berhubungan dengan peran lain. Pemerintah di sini memiliki peran yang amat besar dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai organisasi publik merupakan penyelenggara pelayanan publik terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan. Dikarenakan peran strategis pemerintah desa tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk

menjalankan *local self government* atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut otonomi desa. Dengan demikian, segala kewenangan dan tanggung jawab wajib dilakukan pemerintah desa meliputi kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Paradigma Administrasi Publik menurut Nicholas Henry (dalam Yeremias T. Keban, 2014:31), mencakup fokus dan lokus. Berdasarkan dua kategori tersebut, Henry mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Menurut Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, administrasi harus memperhatikan bagaimana kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat dijalankan, sedangkan politik harus berkonsentrasi pada isu-isu tersebut. Pembagian antara legislatif yang bertugas menyampaikan kehendak rakyat dan badan eksekutif yang bertugas melaksanakan kehendak tersebut merupakan wujud dari pemisahan antara politik dan administrasi. Peran yudikatif adalah untuk membantu legislatif dalam menetapkan tujuan dan membuat kebijakan. Administrasi harus dipandang sebagai kegiatan bebas nilai yang

diarahkan untuk meningkatkan nilai efisiensi dan ekonomi birokrasi pemerintah.

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip administrasi pertama kali diusulkan sebagai inti dari administrasi publik oleh Willoughby, Luther Gullick, dan Lyndall F. Urwick. Pedoman ini diatur dalam POSDCORB yang merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting. Mereka percaya bahwa ide-ide ini dapat digunakan di mana saja, termasuk di lembaga-lembaga pemerintah, meskipun faktanya lokasi administrasi publik tidak pernah dinyatakan secara eksplisit.

c. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Menurut John Gaus, teori administrasi publik juga merupakan filosofi politik. Akibatnya, paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai ilmu politik dengan lokus birokrasi pemerintah menjadi kabur penekanannya karena banyaknya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik. Status ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang unggul pada saat itu, mengakibatkan administrasi publik mengalami krisis identitas.

d. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penggunaan teknologi kontemporer, seperti teknik kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi, merupakan fokus utama dari paradigma ini. Pada paradigma ini, ada dua jalur pengembangan, yaitu yang difokuskan pada kemajuan ilmu administrasi murni yang didukung psikologi sosial, dan yang difokuskan pada kebijakan publik. Semua fokus yang dibahas di sini secara presuntif berlaku untuk dunia administrasi komersial dan publik. Hasilnya lokus menjadi ambigu dan tidak jelas.

e. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Sudah ada fokus dan lokus yang jelas untuk paradigma ini. Lokusnya adalah isu dan kepentingan publik, sedangkan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik menjadi fokus administrasi publik dalam paradigma ini.

Penelitian ini menggunakan paradigma 5, yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal itu karena dalam paradigma ini administrasi publik lebih berfokus pada ranah-ranah ilmu kebijakan atau *Policy Science* dan cara pengukuran hasil-hasil kebijakan yang telah dirumuskan. Aspek ini dapat dinilai sebagai mata rantai yang menghubungkan fokus administrasi publik dengan lokusnya. Pada hal ini fokus administrasi

publik adalah teori-teori organisasi, kebijakan publik, dan teknis administrasi atau manajemen, sedangkan lokusnya adalah birokrasi pemerintah serta persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Peran

Ralph Linton (dalam Isra Hayati, 2021:7) berpendapat bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, antara peran dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.

Agustina (dalam M. Aristia Prayudi, dkk, 2018:453) juga menyatakan bahwa peran merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi

melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya. Beberapa peneliti telah mengaplikasikan konsep-konsep pada teori peran dalam menjelaskan adanya hubungan antara peran yang dirasakan dan dilekatkan pada diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan pekerjaannya.

Di dalam menjalankan peran, tentu akan ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Baik faktor pendukung keberhasilan atau justru faktor penghambat dalam peran. Faktor pendukung peran menurut Horton & Hunt (dalam Ekarishanti, C. dan Kismartini, 2017:6) antara lain:

1. Kompetensi, diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan peran pada sejumlah perilaku yang saling berkaitan
2. Sosialisasi, merupakan proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian besar peran.
3. Perilaku peran, diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka untuk perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Sedangkan untuk faktor yang dapat menghambat peran (*role strain*) antara lain:

1. *Role conflict*, konflik yang terjadi pada peran setidaknya ada dua macam, yaitu konflik antara berbagai peran dan konflik dalam satu peran tunggal.
2. *Role transition*, merupakan masa perubahan dari satu peran ke peran yang lain dan perlu kesiapan peran karena pengalaman belajar dari satu status tidak dapat memberikan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengisi peran berikutnya yang diharapkan akan dipangku seseorang.
3. *Role distance*, yaitu kesenjangan peran yang terjadi apabila seseorang merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan peran yang biasanya menimbulkan menimbulkan perasaan tertekan.

Peran Pemerintah Desa

Dimulainya otonomi desa telah memberikan harapan dan keinginan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan desanya menjadi lebih maju, mandiri dan berhasil berdasarkan potensi yang ada di desa. Pemberian otonomi desa ini harus diikuti dengan peran pemerintah desa yang lebih optimal agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Peran sendiri merupakan suatu perilaku ataupun sikap yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang

terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Apabila dikaitkan dengan peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peran tidak hanya bermakna sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan memang sudah menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah itu sendiri. Pengertian peran pemerintah sendiri menurut Muhtar Haboddin (dalam Alfianto dan Fauzi, 2021:7), merupakan segala aktivitas atau usaha yang dikoordinasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, berkaitan dengan rakyat dan wilayah negara demi terciptanya sebuah tujuan negara

Jim Ife dan Frank Tesoriero (dalam Rochim, 2018: 19) memberikan penjelasan tentang peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan dan mendayagunakan masyarakat untuk mencapai pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Animasi sosial, animasi sosial merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- b. Mediasi dan negosiasi, yaitu yaitu seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi

ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.

- c. Pemberi dukungan, salah satu peran dari pemerintah adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut.
- d. Fasilitator kelompok, yaitu Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan.
- e. Pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan, pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka.
- f. Mengorganisasi yaitu peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk

berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan.

Pemerintah Desa

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa pada alinea ketiga dijelaskan sebagai pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggung jawab kepala desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan membina serta memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui camat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprpto (2021:9), pemerintah desa berfungsi sebagai kepala masyarakat desa, sehingga merupakan tingkatan pemerintahan terendah di wilayah Republik Indonesia.

Pengembangan Pariwisata

W.J.S. Poerwadarminta (dalam Amerta, 2019:14), menyatakan bahwa pembangunan sebenarnya lebih berkaitan dengan cara membuat sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan memberi manfaat berbeda dengan pandangan sebelumnya. Pada intinya, pandangan ini menyampaikan gagasan bahwa pengembangan dilakukan terus menerus sampai diperoleh hasil yang diinginkan.

Samsul Alam Paturusi (dalam Amerta, 2019:14), menyatakan pengembangan merupakan strategi yang digunakan untuk memajukan, memperkaya, dan memperbaiki keadaan pariwisata suatu objek wisata agar dapat dikunjungi wisatawan. Selain itu, dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tempat wisata, pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat umum.

Menurut Robert Christie Mill (dalam Amerta, 2019:14), tujuan utama pengembangan pariwisata adalah memaksimalkan pendapatan dan mengurangi masalah. Ada enam tahap pengembangan pariwisata dengan serangkaian konsekuensi dan efek yang berbeda. Menurut Richard Butler (dalam Amerta, 2019: 14), tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tahap Eksplorasi (*Exploration*)

Tahapan ini menandai awal dari proses ketika pemerintah daerah dan warganya mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan pariwisata setelah menyadari potensi yang dimiliki daerahnya.

2) Tahap Keterlibatan (*Involvement*)

Pada era ini, pengembangan tempat wisata mulai diupayakan secara serius dan industri pariwisata mulai dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, fasilitas kesehatan, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat.

3) Tahap Pengembangan dan Pembangunan (*Development*)

Pada tahap ini, investor dari luar mulai bermunculan untuk membantu mengembangkan pariwisata.

4) Tahap Konsolidasi (*Consolidation*)

Pada fase ini, tingkat pertumbuhan pengunjung sudah mulai melambat, namun secara keseluruhan jumlah pengunjung masih relatif meningkat.

5) Tahap Kestabilan (*Stagnation*)

Pada tahap ini destinasi wisata sudah mencapai titik jenuhnya.

6) Tahap Penurunan Kualitas (*Decline*) dan Kelahiran Baru (*Rejuvenation*)

Ada dua kemungkinan apabila suatu destinasi wisata berada dalam fase stagnan. Pertama yaitu terjadi penurunan (*Decline*) dan yang kedua adalah berhasil berinovasi

dan memasuki fase kelahiran baru (*Rejuvenation*). Saat masa stagnasi, kelahiran kembali dan inovasi diperlukan agar destinasi wisata tetap bisa bertahan. Ini sangat bergantung pada pemikiran matang dan rencana tindakan yang menuntut kreativitas dan adaptivitas.

Desa Wisata

Menurut Gamal Suwanto (dalam Amerta, 2019: 27), desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memberikan suasana utuh yang mencerminkan keaslian desa, meliputi tata ruang, arsitektur bangunan, pola kehidupan sosial budaya masyarakat, serta ritual sehari-hari. Di samping itu, mampu memenuhi komponen kebutuhan mendasar wisatawan, antara lain penginapan, makanan dan minuman, kenang-kenangan, dan atraksi wisata.

Selanjutnya, I Made Suniastha Amerta (2019: 27), menerangkan bahwa desa wisata termasuk dalam kategori usaha kecil karena menggunakan sumber daya lokal, membutuhkan sedikit modal awal, dan dikendalikan serta dimiliki oleh masyarakat. Desa wisata dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan identitas dan ciri khas daerah sesuai dengan kearifan lokal, prinsip dan praktek adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Bojonegoro.

Peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah tersebut, dapat ditinjau menggunakan teori yang diungkapkan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang meliputi beberapa indikator, yakni: peran dalam animasi sosial; peran dalam mediasi dan negosiasi; peran dalam pemberi dukungan; peran dalam memfasilitasi kelompok; peran dalam pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan; dan peran dalam mengorganisasi.

1. Peran dalam Animasi Sosial

Jim Ife dan Frank Tesoriero (dalam Rochim, 2018: 19), memberikan penjelasan tentang peran pemerintah dalam animasi sosial, yang merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.

Pemerintah Desa Rendeng dalam upaya mewadahi kreativitas masyarakatnya berinisiatif untuk mendirikan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Pemerintah Desa Rendeng memberi

kesempatan yang luas bagi warganya untuk ikut berperan aktif dalam upaya pengembangan desa wisata. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama Kepala Desa Rendeng, diketahui bahwa peran utama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rendeng yaitu memberikan wadah seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Karya Mulia, dan Karang Taruna Desa Rendeng yang bernama Satria Muda. Pemerintah Desa Rendeng berperan besar dalam membantu menstimulasi pengelolaan organisasi-organisasi tersebut. Di dalam pengelolaan tersebut, Pemerintah Desa Rendeng juga memberi inspirasi dan memotivasi warga sekitar untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata.

Pemerintah Desa Rendeng telah berupaya menginspirasi, membangkitkan energi, antusiasme dan memotivasi masyarakat untuk bertindak dalam membantu mengembangkan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Pemerintah Desa Rendeng juga dinilai telah berhasil dalam menjadikan masyarakatnya lebih unggul, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi. Akan tetapi, peran yang dijalankan Pemerintah Desa Rendeng sebagai animasi sosial sejauh ini belum optimal. Hal itu karena masih terdapat kendala yang menghambat peran pemerintah desa tersebut. Hambatan itu

yakni terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa Rendeng.

2. Peran dalam Mediasi dan Negosiasi

Jim Ife dan Frank Tesoriero (dalam Rochim, 2018: 19), mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam mediasi dan negosiasi, yaitu pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator. Hal itu dilakukan guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik, agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.

Mengkaji dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pada awal pembangunan desa wisata, pemerintah desa menjumpai masalah yang cukup kompleks dan perlu segera diatasi. Masalah tersebut diantaranya adalah terdapat masyarakat yang tidak mau ikut bergabung pada pengembangan wisata edukasi gerabah yang dibentuk oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Staff Pemerintah Desa Rendeng, menyebutkan bahwa di Desa Rendeng terdapat dua wisata edukasi gerabah. Satu dari wisata edukasi gerabah itu dikelola oleh pemerintah desa dan satu lagi milik pribadi atau perorangan.

Pemerintah Desa Rendeng telah mensosialisasikan komitmennya untuk membawa kepentingan desa dalam proses

pengembangan desa wisata. Seiring berjalannya waktu, dengan melihat keberhasilan pengembangan desa wisata sekarang ini, telah berhasil meredam pro dan kontra yang terjadi. Masyarakat kini sangat berantusias untuk ikut serta dalam menjual gerabahnya di desa wisata. Di dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan negotiator, Pemerintah Desa Rendeng sering melakukan rembung desa untuk membahas mengenai gambaran umum dan langkah-langkah yang diambil dalam mengembangkan desa wisata.

3. Peran dalam Memberikan Dukungan

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (dalam Rochim, 2018: 19), peran pemerintah sebagai pemberi dukungan merupakan penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap warga, yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Sebagai salah satu penanggung jawab utama, Pemerintah Desa Rendeng berkomitmen kuat memberi dukungan dalam berbagai aspek pengembangan desa wisata.

Dukungan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata bersifat sangat penting dan krusial. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menetapkan dan memutuskan strategi guna mendukung serta mensukseskan pertumbuhan pariwisata, merupakan kewenangan dari Kepala Desa Rendeng sebagai pemimpin Pemerintah Desa Rendeng. Dengan

demikian, Kepala Desa Rendeng dituntut untuk membantu pengembangan pariwisata, dengan mengambil keputusan tentang kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Salah satunya, seperti kebijakan penciptaan sarana dan prasarana umum yang mendukung kegiatan pariwisata. Terlepas dari segala peran yang dilakukan Pemerintah Desa Rendeng sebagai pemberi dukungan, baik berupa dukungan moral, sarana prasarana, maupun pelatihan-pelatihan SDM, tetapi secara keseluruhan peran ini belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini karena Pemerintah Desa Rendeng masih mempunyai hambatan terkait dengan kurangnya pendanaan.

4. Peran dalam Fasilitas Kelompok

Peran pemerintah sebagai fasilitator kelompok pada penelitian ini berarti bagaimana Pemerintah Desa Rendeng memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Sebuah desa wisata dapat dikatakan berhasil apabila ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Sebaliknya, apabila fasilitas yang ada tidak dibangun seiring dengan pengembangan desa wisata, desa wisata tersebut akan susah untuk menarik minat pengunjung.

Sayangnya, dalam menjalankan peran ini Pemerintah Desa Rendeng masih

belum bisa maksimal, karena memiliki kendala terkait dengan pendanaan. Dana yang selama ini telah dianggarkan untuk pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. ternyata belum mencukupi untuk menutup semua kebutuhan pembangunan fasilitas desa wisata. Akibatnya, di Desa Rendeng sendiri dalam pengembangan wisatanya, fasilitas yang ada masih kurang optimal. Fasilitas merupakan penunjang utama dalam pengembangan desa wisata.

5. Peran dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan

Pada peran ini, Pemerintah Desa Rendeng sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan, serta sumber daya yang ada dalam suatu komunitas. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, dapat kita lihat upaya Pemerintah Desa Rendeng dalam memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada, melalui berbagai program yang telah berjalan selama kurang lebih delapan tahun belakangan ini. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi pemerintah dalam merumuskan strategi pariwisata strategis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan

sumber daya dan keterampilan oleh Pemerintra Desa Rendeng pada pengembangan desa wisata ini, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan warga bersangkutan. Tidak hanya itu, Kepala Desa Rendeng juga mengungkapkan bahwa pengembangan desa wisata tersebut sedikit banyak telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), meskipun masih dalam jumlah yang sedikit, yakni sekitar 5%. Sementara itu, penyumbang terbesar PAD Rendeng terdapat di Tanah Kas Desa (TKD).

6. Peran dalam Mengorganisasi

Peran sebagai pengorganisasi pada penelitian ini berarti keterampilan Pemerintah Desa Rendeng dalam mengorganisasi dan melibatkan kemampuan masyarakatnya, untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di desa Rendeng. Pada pengembangannya, Desa Wisata Edukasi Gerabah tidak lepas dari peran besar BUMDes dan Karang Taruna. Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab, telah mengarahkan organisasi-organisasi tersebut untuk bersama-sama membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui pengembangan desa wisata. Organisasi tersebut telah berperan besar dalam melakukan pemasaran dan

pengenalan produk gerabah ke daerah atau kota-kota lain. Di samping itu, juga membantu masyarakat dalam membuat design produk agar lebih menarik pengunjung dan pembeli.

Organisasi-organisasi tersebut tentu tidak lepas dari peran pemerintah desa dalam memfasilitasi, mengawasi, dan mengarahkan keberjalanannya. Sangat penting dilakukan pengawasan terhadap semua tindakan dan hasil dari proses transformasi untuk meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan. Pengawasan memungkinkan Pemerintah Desa untuk mendeteksi lebih dini dari setiap penyelewengan yang mungkin timbul. Adanya pengawasan dapat mendeteksi kekurangan dan kesalahan cukup awal agar memungkinkan pemerintah desa melakukan perbaikan dan peningkatan yang cepat.

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Bojonegoro.

1. Faktor Pendukung

- a. Sejumlah faktor turut mendukung keberhasilan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Di dalam menjalankan perannya sebagai animasi sosial, Pemerintah Desa Rendeng didukung oleh

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta dinas terkait meyakini bahwa desa wisata tersebut dapat meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga turut membantu pemerintah desa dalam melakukan promosi di berbagai pameran. Adanya dukungan ini sangat membantu Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai animasi sosial.

- b. Pemerintah Desa Rendeng dalam mengembangkan Desa Wisata Edukasi Gerabah sempat menemui sejumlah konflik di tengah masyarakat. Konflik tersebut berhasil diatasi dengan adanya dukungan dari RT dan RW setempat. Pemerintah Desa Rendeng bersama RT dan RW, sering melakukan musyawarah dan rembuk desa bersama masyarakat untuk membahas arah dan tujuan pengembangan desa wisata, yang semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Dukungan ini sangat membantu Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan

- perannya sebagai mediator dan negotiator.
- c. RT dan RW mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kerja bakti, serta pemeliharaan fasilitas-fasilitas di lokasi wisata yang diadakan oleh Pemerintah Desa Rendeng. Adanya dukungan dari RT dan RW ini, tentu sangat membantu Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator kelompok.
 - d. Pemerintah kabupaten membantu memfasilitasi berbagai pelatihan pembuatan gerabah modern, yang diajarkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Rendeng. Adanya pelatihan tersebut, telah memberi banyak pengaruh pada peningkatan keterampilan masyarakat dalam memproduksi gerabah menjadi lebih menarik. Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya tersebut juga mendapat dukungan dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Dukungan tersebut berupa program pengembangan usaha kreatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Tidak hanya itu, Pemerintah Desa Rendeng juga mendapat bantuan berupa alat putar gerabah, etalase, rak kayu, pengeras suara, dan celemek.
 - e. Karang taruna sebagai organisasi yang pertama kali menginisiasi berdirinya wisata edukasi gerabah, memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai pengorganisasi. Hal itu karena Pemerintah Desa Rendeng tidak perlu bersusah payah untuk mengajak Karang Taruna terlibat dalam pengembangan desa wisata, yang saat ini telah dijalankan oleh pemerintah desa.

2. Faktor Penghambat

- a. Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai animasi sosial terhambat oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum di Desa Rendeng. Peran pemerintah desa sebagai animasi sosial tentunya harus dapat memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat, agar terlibat dalam pengembangan desa wisata.
- b. Keterbatasan dana menjadi salah satu penghambat peran pemerintah desa dalam mengembangkan wisata di Desa Rendeng. Dana yang selama ini telah dianggarkan untuk Karang Taruna dan BUMDes, nyatanya belum dapat menutup semua kebutuhan pembangunan

desa wisata. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi peran pemerintah desa sebagai pemberi dukungan dan memfasilitator kelompok.

- c. Pemerintah Desa Rendeng sampai saat ini belum membuat dan merumuskan Peraturan Desa yang berkaitan dengan desa wisata. Hal ini menjadi penghambat Pemerintah Desa Rendeng, dalam menjalankan perannya sebagai pengorganisasi pada proses pengembangan desa wisata. Padahal pembuatan aturan atau undang-undang dapat menjadi landasan pemerintah desa, dalam mengembangkan sebuah wilayah wisata baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, antara lain:

- a. Peran Pemerintah Desa Rendeng sebagai animasi sosial, yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dinas-dinas terkait untuk menciptakan desa yang mandiri. Sayangnya, peran tersebut belum dapat berjalan optimal karena

tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

- b. Peran pemerintah desa dalam mediasi dan negosiasi, yang didukung oleh RT dan RW dalam memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pembangunan Desa Wisata Edukasi Gerabah ini semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan, secara keseluruhan peran ini belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini karena Pemerintah Desa Rendeng masih mempunyai hambatan terkait dengan kurangnya pendanaan.
- d. Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi kelompok, yang didukung oleh RT dan RW dalam mengadakan kerja bakti secara rutin untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada. Akan tetapi, peran ini belum dapat berjalan optimal karena masih ada hambatan, yaitu masalah terbatasnya pendanaan.
- e. Peran pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan EMCL yang membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi berbagai program pemberdayaan

masyarakat dan ketersediaan alat pembuatan gerabah.

- f. Peran pemerintah desa dalam mengorganisasi, Karang Taruna menjadi salah satu pendukung utama pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai pengorganisasi. Sayangnya, peran ini belum dapat dikatakan optimal karena tidak ada kebijakan atau peraturan desa yang dirumuskan.

Saran

- a. Pemerintah desa perlu melakukan edukasi ke masyarakat melalui pembimbingan dan kerja sama secara merata di seluruh lapisan masyarakat, agar pemahaman masyarakat terhadap desa wisata meningkat.
- b. Pemerintah desa perlu lebih gencar mensosialisasikan tujuan pembangunan desa wisata kepada masyarakat untuk mencegah permasalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- c. Pemerintah desa perlu mencari bantuan dana kepada investor-investor luar serta dinas-dinas terkait agar hambatan terkait keterbatasan dana dapat teratasi.
- d. Pemerintah desa perlu membangun dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana, seperti buruknya kualitas

jalan, area parkir yang terbatas, serta halaman lokasi edukasi gerabah yang kurang memadai.

- e. Pemerintah desa perlu menggali keistimewaan dan keunikan lain dari desa untuk dapat dikembangkan sebagai wisata baru, sehingga wisatawan tidak bosan dengan atraksi yang diberikan.
- f. Pemerintah desa perlu segera membuat perangkat-perangkat aturan atau dasar hukum tentang desa wisata. Adanya pedoman peraturan ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mengetahui arah pelaksanaan segala kegiatan pengembangan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mansyur. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perspektif Regulatif dan Aplikatif)*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Amerta, I Made Suniastha. (2019). *Pengembangan Pariwisata Alternatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Andriwiguna, Adhy. (2022). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Arif, Mirrian Sjofyan. (2016). *Manajemen Pemerintahan: Hubungan Antara Administrasi, Organisasi, dan*

Manajemen. Banten: Universitas Terbuka.

Gainau, Maryam B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Hawke, Neil dan Neil Parpworth. (2021). *Pemerintah Daerah Seri Pengantar Hukum Administrasi, Widowati, terj.* Yogyakarta: Nusamedia.

Kadji, Yulianto. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto. (2021). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ridwan, Mohamad dan Windra Aini. (2019). *Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Jurnal

Alfianto, Ferbiansyah Yona dan Agus Machfud F. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Pakuncen. *E-Journal Universitas Negeri Surabaya*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/44589/37870>

Desa Rendeng Bojonegoro Kembangkan Wisata Edukasi Gerabah - ANTARA News Jawa Timur. (n.d.). Retrieved October 5, 2022, from <https://jatim.antaranews.com/berita/193801/desa-rendeng-bojonegoro-kembangkan-wisata-edukasi-gerabah>

Ekarishanti, Chrecencya dan Kismartini. (2017). *Voluntary Instrument pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang*. 1–15.

Mantu, Yukiko Hiro. (2019). Studi literatur: pariwisata sebagai ilmu pengetahuan, disiplin ilmu atau kajian. *Jurnal Hospitality*, Vol. 8, No.2, Desember 2019. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/20/19>

Prayudi, Made Aristia, dkk. (2018). Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449–467.

Rochim, Ahmad. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. 137-154.

Suryadi, Novan. (2020). Peran Pemerintah dalam Menangani Banjir di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020,8 (2): 425-436.

Artikel

Situs Resmi Pemkab Bojonegoro. (n.d.). Retrieved October 21, 2022, from <https://bojonegorokab.go.id/profile/demografi-3>